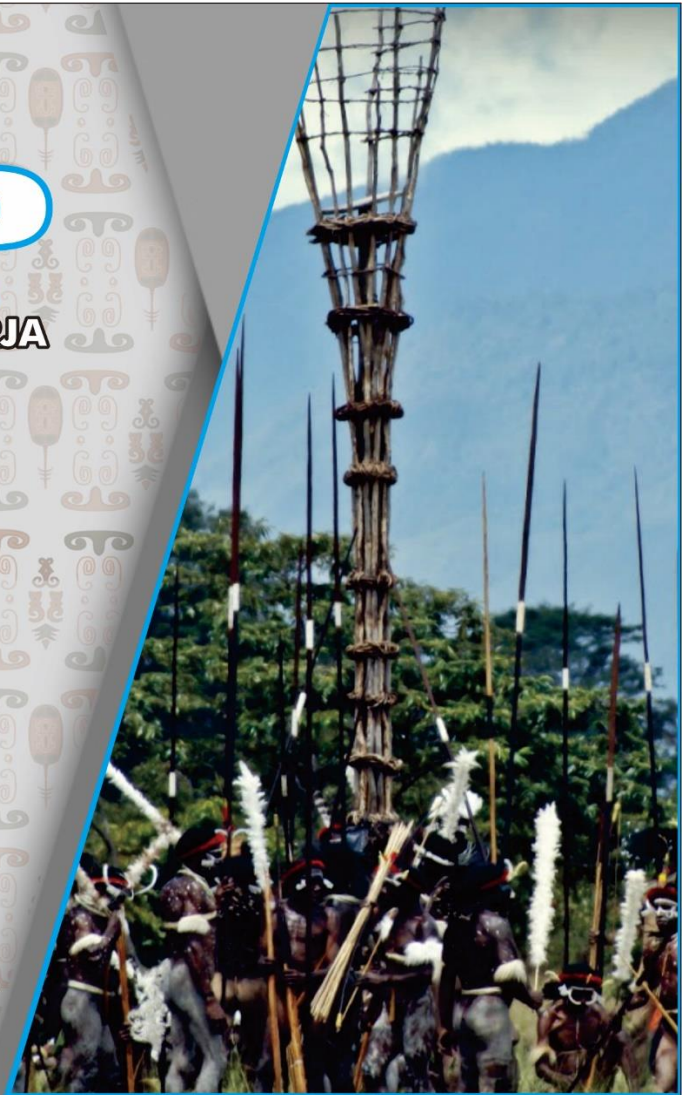


# LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya atas limpahan Rahmat serta Karunia\_Nya sehingga penyusunan LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan *Output* (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan serta mengetahui produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan.

Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan LKj ini, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga LKj ini dapat bermanfaat.

**Wamena, Februari 2023**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**THONY M. MAYOR, S.Pd, MM**  
**NIP. 19690807 199702 1 001**

## **KHTISAR EKSEKUTIF**

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penggunaan anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah/Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja memuat ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan, sejauh mana sasaran dicapai dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa secara keseluruhan trend peningkatan kinerja pelayanan dalam kategori sangat baik. Keberhasilan yang dicapai tersebut tetap menjadi tolak ukur bagi Sekretariat Daerah untuk semakin menyempurnakan kinerja di tahun berikutnya, mengingat tuntutan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks.

## DAFTAR ISI

<b>KATAPENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
1. Maksud LKJ .....	2
2. Tujuan LKJ .....	2
3. Dasar Hukum .....	2
<b>B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI</b> .....	7
1. Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah .....	7
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	16
<b>A. RENCANA STRATEGIS</b> .....	16
1. Visi .....	16
2. Misi .....	17
3. Tujuan dan Sasaran .....	18
<b>B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2022</b> .....	19
1. Komitmen Kinerja Tahun 2022 .....	19
2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	22
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	22
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	62
<b>A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA</b> .....	62
<b>B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI</b> .....	63
<b>C. RENCANA TINDAK LANJUT</b> .....	63

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah TA 2022

Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah TA 2022

Laporan Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah TA 2022

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau juga disebut LKj merupakan sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. LKj Sekretariat Daerah disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 juga sebagai perwujudan dari *good governance*.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah membawa konsekuensi terhadap penataan organisasi, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya. Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Jayawijaya yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, maka diharapkan Sekretariat Daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang didasari pada profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik, dalam kerangka akselerasi perwujudan serta implementasi kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global (*global competition*). Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan daerah.

Penyusunan LKj pada setiap akhir tahun merupakan evaluasi internal yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah sehingga Sekretaris Daerah dapat mengetahui capaian kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

## **1. Maksud LKJ**

Penyusunan LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja, berdasarkan *Output* (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. Selain itu untuk mengetahui produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan.

## **2. Tujuan LKj**

- a. LKj ini disusun agar dapat mengetahui secara pasti tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Mempertanggungjawabkan misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dalam rangka perwujudan good governance.

## **3. Dasar Hukum**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya ini landasan hukum yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD;

19. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor / 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
27. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
29. Peraturan Daerah Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005 – 2025 maka perlu dilakukan review Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2013 – 2018;

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari;

#### **1) Sekretaris Daerah**

#### **2) Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Membawahi :

- a) Bagian Pemerintahan
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c) Bagian Hukum dan Perundang-undangan

#### **4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Membawahi :

- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- b) Bagian Administrasi Pembangunan
- c) Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

#### **5) Asisten Administrasi Umum**

Membawahi:

- a) Bagian Umum
- b) Bagian Organisasi
- c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- d) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Gambar Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, termuat dalam halaman lampiran.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah**

Dalam Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tersebut, menetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri atas beberapa jabatan dan memiliki tugas pokok sebagai berikut :

### **A. Sekretaris Daerah.**

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat Daerah, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administratif hukum dan perundang – undangan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, layanan pengadaan serta penanganan kerja sama dan perbatasan. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
- e. Perumusan hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, layanan pengadaan, hubungan masyarakat dan protokol
- f. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan bahan penetapan program pembangunan daerah serta rancangan APBD sebagai bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan maupun keuangan daerah
- g. Pengoordinasian pengelolaan keuangan
- h. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan pengelolaan barang daerah

- i. Pengkoordinasian penyusunan raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- j. Pengkoordinasian tugas-tugas pejabat perencanaan pembangunan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) dan pejabat keuangan daerah
- k. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- l. Pembinaan persetujuan pengesahan DPA SKPD
- m. Perumusan naskah keputusan pengangkatan dan atau mutasi dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional pada seluruh perangkat daerah
- n. Penanganan urusan kerjasama dan perbatasan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## **B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum

- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

### **C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemngadaan barang jasa
- e. Pemantauan dan evaluasai pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya lama, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya

#### **D. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretrasi Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

##### **1) Bagian Pemerintahan**

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan



evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah. Bagian pemerintahan membawahi;

- a. Sub bagian administrasi pemerintahan
- b. Sub bagian administrasi kewilayahan
- c. Sub bagian kerjasama dan otonomi daerah

## **2) Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi :

- a. Sub bagian bina mental spritual
- b. Sub bagian kesejahteraan sosial
- c. Sub bagian kesejahteraan rakyat

## **3) Bagian Hukum dan Perundang-undangan.**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang – undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan membawahi :

- a. Sub bagian perundang-undangan
- b. Sub bagian bantuan hukum
- c. Sub bagian dokumentasi dan informasi

## **4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bagian Perekonomiandan sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BULD, perekonomian sumber daya alam. Bagian perekonomian dan sumber daya alam membawahi :

- a. Sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD
- b. Sub bagian perekonomian
- c. Sub bagian sumber daya alam

**5) Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan persiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Bagian administrasi pembangunan membawahi :

- a. Sub bagian penyusunan program
- b. Sub bagian pengendalian program
- c. Sub bagian evaluasi dan pelaporan

**6) Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**

Bagian Pengadaan Barang / Jasa mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Bagian pengadaan barang dan jasa membawahi :

- a. Sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa

- b. Sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- c. Sub bagian pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa

#### **7) Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian umum membawahi :

- a. Sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian
- b. Sub bagian perlengkapan
- c. Sub bagian rumah tangga

#### **8) Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian organisasi membawahi :

- a. Sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan
- b. Sub bagian pelayanan publik dan tata laksana
- c. Sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi

#### **9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Bagian protokol dan komunikasi pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan membawahi :

- a. Sub bagian protokol
- b. Sub bagian komunikasi pimpinan
- c. Sub bagian dokumentasi pimpinan

#### **10) Bagian Administrasi Keuangan**

Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Bagian perencanaan dan keuangan membawahi :

- a. Sub bagian perencanaan
- b. Sub bagian keuangan
- c. Sub bagian pelaporan

#### **11) Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya merupakan kerangka pembangunan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai Dokumen Perencanaan Strategis yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja untuk periode 2018 - 2023.

Dalam mendukung misi, Sekretariat Daerah mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas pelayanan publik melalui penerapan *good governance*.

#### 1. Visi

Adalah hasil refleksi dan antisipasi atau perkiraan tentang arah yang hendak dituju oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang dirumuskan berdasarkan keseluruhan potensi sumber daya yang dimiliki, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rumusan Visi dan Misi tersebut adalah :

**"JAYAWIJAYA YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA, MANDIRI SECARA EKONOMI DAN SEJAHTERA".**

- a. **Berkualitas**, merupakan upaya atau ikhtiar pemerintah daerah agar Jayawijaya mempunyai kualitas dan bermutu baik.
- b. **Berbudaya**, merupakan upaya atau ikhtiar pemerintah daerah didalam menyiapkan pemerintahan yang mempunyai budaya, pikiran dan akal yang sudah maju.
- c. **Mandiri Secara Ekonomi**, adalah usaha pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam membangun perekonomian yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

d. **Sejahtera** merupakan upaya pemerintah Kabupaten Jayawijaya menciptakan lingkungan yang aman sentosa dan makmur.

## 2. Misi

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, maka ditetapkanlah Misi Kepala Daerah Jayawijaya yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya.
- c. Meningkatkan perlindungan nilai-nilai budaya dan hak-hak dasar masyarakat Jayawijaya
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal
- e. Meningkatkan infrastruktur daerah

Dan yang menjadi Misi Sekretariat Daerah yang harus dilaksanakan, adalah ;

**“Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola  
Pemerintahan Yang Baik”**

Misi ini merupakan upaya Sekretariat Daerah dalam membangun kesiapan kondisi internal organisasi itu sendiri dengan memaksimalkan kapasitas seluruh sumber daya yang ada, sehingga kinerja yang dihasilkan menuju kepada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

## 3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran makna dari setiap misi tersebut, yaitu sebagai berikut :

---

## **Misi**

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

---

## **Tujuan**

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip e-goverment

---

## **Sasaran**

Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, program serta kegiatan digambarkan secara jelas pada halaman lampiran.

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai Sekretariat Daerah selama satu tahun anggaran. Penetapan kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan target kerja yang harus diwujudkan oleh Sekretariat Daerah selama Tahun 2022 dengan mempertimbangkan segala potensi dan hambatan yang ada. Adapun penetapan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 memuat indikator kinerja utama Sekretariat Daerah serta program dan kegiatan yang menunjang untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana terdapat dalam lampiran.

### 1. Komitmen Kinerja Tahun 2022

Komitmen kinerja yang ingindi capai pada Tahun 2022 dan kondisi capaian satu (1) tahun sebelumnya (2021), digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi dan tujuannya, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja  
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja (SKOR)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip - prinsip e-goverment	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretriati Daerah	Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Adminisstrasi	85
			IKM	85
		Meningkatnya Citra Positif Kabupaten Jayawijaya pada Publik	Persentase Berita Positif Kabupten Jayawijaya pada Publik	98%
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang ekonomi dan Investasi	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	85%



	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	85%
	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	85%
	Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	85%
	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perumahan dan Infrastruktur	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perumahan dan Infrastruktur yang dilaksanakan sesuai rencana	85%
	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase OPD yang tepat Fungsi dan tepat Ukuran	85%
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP Kabupten Jayawijaya	90 (B)
		Nilai LPPD	3
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya	0%

## 2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen

Dalam implementasi Sistem LKj dilingkungan Sekretariat Daerah, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan terhadap komitmen kinerja tersebut disampaikan dengan memberikan atribut pada capaian masing - masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

**Tabel 2.2****Atribut Keberhasilan Atas Komitmen Kinerja**

<b>No</b>	<b>Nilai Capaian Kinerja</b>		<b>Pemberian Atribut</b>
	<b>%</b>	<b>Keterangan Persentase</b>	
1.	85% s.d 100%	Delapanpuluh lima persensampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d< 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d< 70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X < 55%	Dibawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tingkat kinerja yang dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2022, secara sistematis akan diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan analisis capaian kinerja, selanjutnya uraian akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pimpinan yang memberi wewenang atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja di halaman lampiran.

Selain itu juga ada perbandingan terhadap realisasi yang telah dicapai pada Tahun 2020 dan 2021. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut ***Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil dan Tidak Berhasil***, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pencapaian pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

## Indikator Kinerja

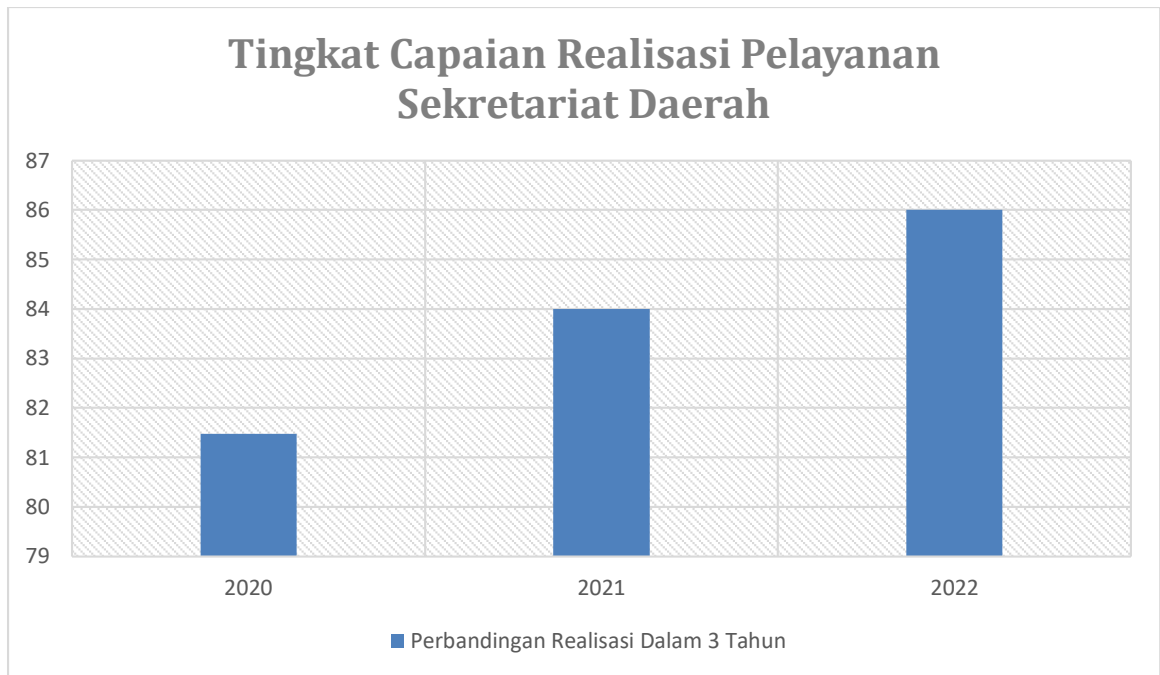
### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah

Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administarsi, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Misi 1 : Tujuan 1 : Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2022			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Tingkat Kepuasan aparatur terhadap pelayanan Administrasi	81,481	84%	85%	86%	101,176%	Sangat Berhasil

Dalam rangka peningkatan kepuasan aparatur terhadap pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah maka Sekretariat Daerah melalui Sepuluh (10) Bagian didalamnya telah membuat keseragaman berupa Sistem Mekanisme Pelayanan, yang terdiri dari Pelayanan Administrasi Peminjaman dan Permintaan Dokumen/data, Pelayanan Konsultasi-Administrasi, Waktu Pelayanan serta Biaya Tarif. Dengan adanya keseragaman Sistem Mekanisme Pelayanan maka akan mempermudah Aparatur maupun masyarakat untuk mendapat pelayanan dari Sekretariat Daerah.



Sesuai survei yang telah dilakukan Sekterariat Daerah mendapat nilai 86 persen atau masuk dalam kategori B (BAIK). Nilai tersebut telah memenuhi 10 unsur penilaian dan rata-rata penilaian dari tiap unsur adalah baik, namun ada satu unsur yang menunjukkan nilai kurang baik yaitu Sarana dan Prasarana. Hal itu dikarenakan ruangan/kantor Sekretariat Daerah yang terdiridari 10 Bagian hanya memiliki 2 (dua) ruangan kerja, kondisi ini merupakan dampak dari konflik sosial tahun 2019 lalu di kota Wamena, sehingga sarana dan prasarana sangat terbatas untuk pelayanan publik. Dari nilai tersebut maka capaian dari Tingkat Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi adalah 103,356 persen dan masuk kategori Sanagat Berhasil.

**Indikator Kinerja  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

**Tabel 3.2  
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2022			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1	IKM	77,62%	77,98%	85%	77,05%	90,64%	Sangat Berhasil

Pada dasarnya baik dan tidaknya kinerja suatu pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa jauh kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Dari hasil pengelolaan data kuesioner pada kepuasan masyarakat yang disebar ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2022, nilai rata-rata mutu pelayanan adalah 77,05 persen maka jika dikelompokkan masuk pada kategori B (Baik), namun capaian tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan tahun 2022 sebesar 85 persen.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan tidak semua perangkat daerah menyebarkan kuesioner kepuasan masyarakat sesuai dengan jumlah sampel yang seharusnya, hal ini menyebabkan angka nilai mutu pelayanan menjadi 77,05 persen dibawah target yang telah ditetapkan tahun 2022. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 ada penerunan dari 77,98 persen menjadi 77,05 persen, namun peningkatan ini belum mencapai target tahun 2022 sebesar 85 persen.

Hasil pengolahan data kuesioner di tahun 2022 diperoleh dari 3595 responden yang ada pada 28 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan nilai IKM sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Nilai IKM Organisasi Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022**

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1.	Sekretariat Daerah	76.46	Baik
2.	Inspektorat	83.16	Baik
3.	DPRD	80,870	Baik
4.	Dinas Pendidikan	78.62	Baik
5.	Dinas Kesehatan	76.67	Baik
6.	Dinas PUPR	83.62	Baik
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	81.74	Baik
8.	SATPOL PP	73.46	Kurang Baik
9.	Dinas Sosial	84.68	Sangat Baik
10.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	84.27	Baik
11.	Dinas Ketahanan Pangan	85.25	
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.25	Cukup
13.	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung	78.72	Baik
14.	Dinas Perhubungan	79.20	Baik
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	81.4	Baik
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.848	Baik
17.	Dinas Olahraga dan Pemuda	78.20	Baik
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	80.15	Baik
19.	Dinas Perpustakaan	83.29	Baik
20.	Dinas Pertanian	81.83	Baik

21.	Dinas Perikanan	84.175	Baik
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76.89	Baik
23.	Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	78.209	Baik
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.1	Baik
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69.67	Cukup
26.	Rumah Sakit Umum Daerah	81.423	
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	82.33	Baik
28.	Dinas Lingkungan Hidup	81.92	Baik
29.	BKDPSDM	-	-
30.	Distrik	-	-
	<b>Nilai Rata-rata</b>	<b>77,98%</b>	<b>BAIK</b>

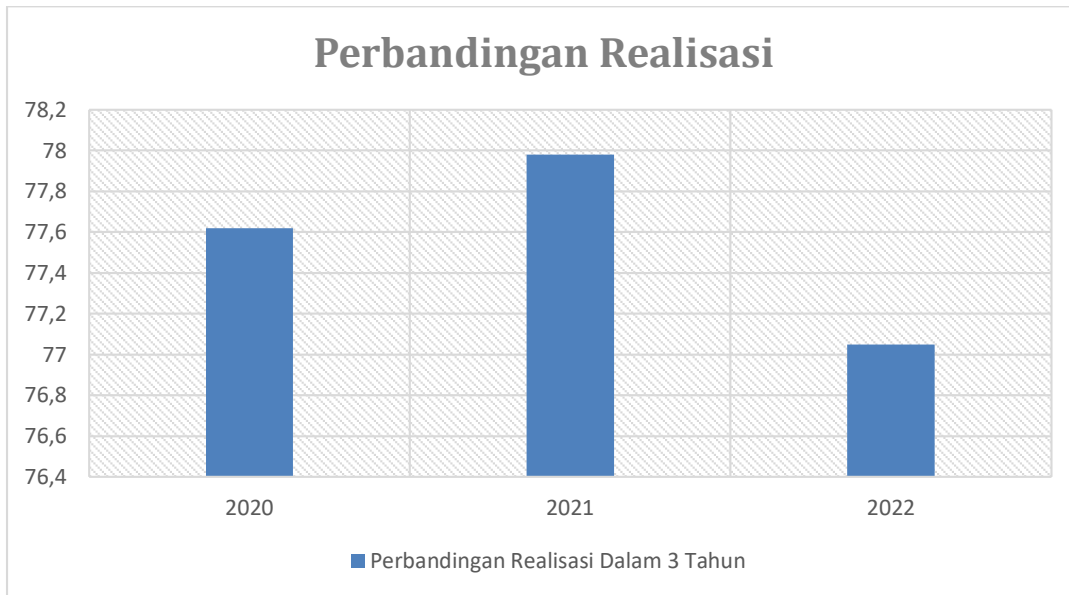
Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022*

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari 28 perangkat daerah adalah 77.05 persen dengan mutu pelayanan tersebut kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya masuk dalam kategori BAIK. Nilai tertinggi kepuasan pelayan ada pada Dinas Sosial, sedangkan untuk nilai terendah dan masuk dalam kategori TIDAK BAIK tahun 2021 ada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Kemudian dari unsur yang ada pada setiap perangkat daerah, ada beberapa nilai unsur yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas ata spelayanan yang diberikan antara lain biaya tarif, kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan dan perilaku masyarakat. Beberapa unsur yang dapat nilai terendah adalah sarana dan prasarana, kecepatan waktu pelayanan dan perilaku penanganan. Sarana dan prasarana memang masih menjadi persoalan utama yang menghambat pelayanan kepada masyarakat dan ini menjadi focus perbaikan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang antara lain sudah Membuat papan Informasi pelayanan yang



seragam diseluruh perangkat daerah dan penambahan sarana prasarana pada beberapa perangkat daerah agar lebih meningkatkan mutu pelayanan.



Dalam pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022 diberikan anggaran Rp. 245.000.000 yang masuk pada kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana.

### Indikator Kinerja

#### Meningkatnya Citra Positif Kabupaten Jayawijaya

Persentase Berita Positif Kabupaten Jayawijaya Pada Publik, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sarannya adalah Meningkatkan Citra Positif Kabupaten Jayawijaya.

Peningkatan Citra Positif Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Meningkatnya Citra Positif Kabupaten Jayawijaya**

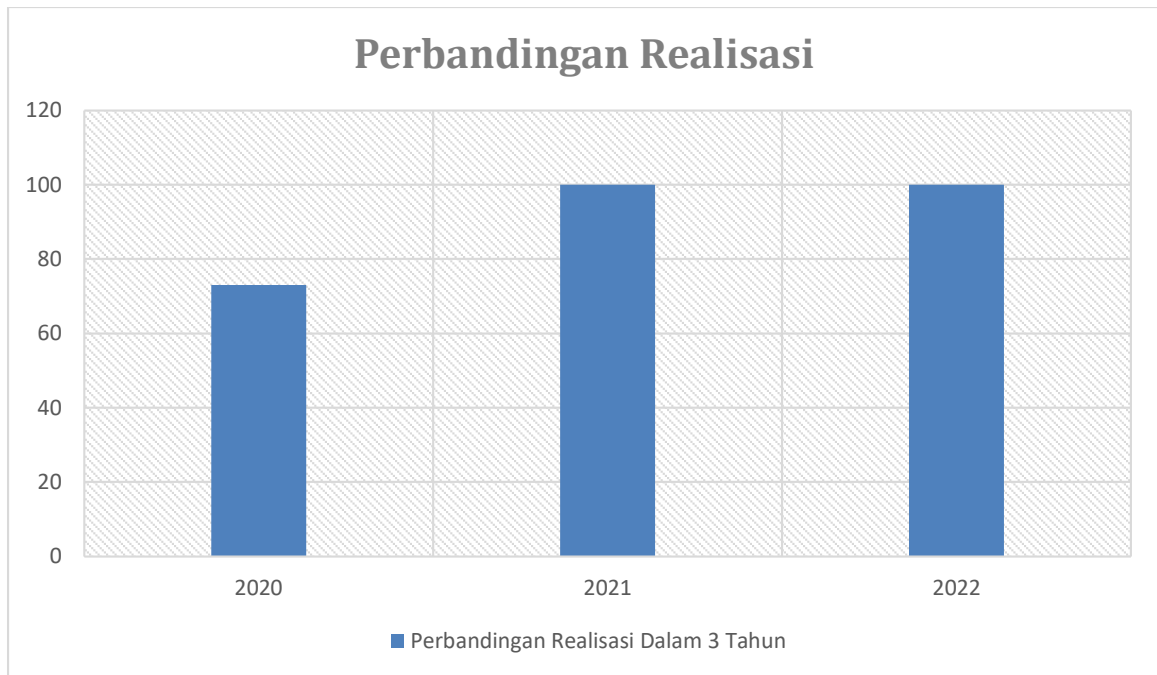
No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Perentase berita positif Kabupaten	73%	100%	98%	100%	102,04%	Sangat Berhasil

	Jayawijaya pada public						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

Dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan kerjasama dengan beberapa media massa melalui Memorandum of Understanding (MoU) sebagai berikut:

1. PT. Cenderawaih ArenaIntim Press (CEPOS), Nomor 042/315/SET
2. PT. Kabar Papua Global (Papua Online), Nomor 042/316/SET
3. PT. Media Kawat Papua Brosta (Kawaet Timur Online), Nomor 042/317/SET
4. PT. Fidelidea Media Mandiri(Papua Inside Online), Nomor 042/318/SET
5. Kantor Berita Indonesia Antara (Antara News), Nomor 042/319/SET
6. PT. JujurBicara Papua (Koran Jubi), Nomor 042/320/SET
7. Lembaga PenyiaranPublikTVRI Stasiun Papua, Nomor 042/321/SET
8. Lembaga PenyiaranPublik RRI Wamena, Nomor 042/322/SET

Untuk tahun 2021 target Berita Positif adalah 98 persen dengan relaisai sebesar 100 persen dan Capaian sebesar 102,04 persen. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di tahun 2022 berusaha memaksimalkan keadaan tersebut untuk penyebaran berita melalui media informasi yang ada, dengan informasi yang baik dan jelas dan dapat diterima baik oleh publik.



#### Indikator Kinerja

#### Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang ekonomi dan Investasi

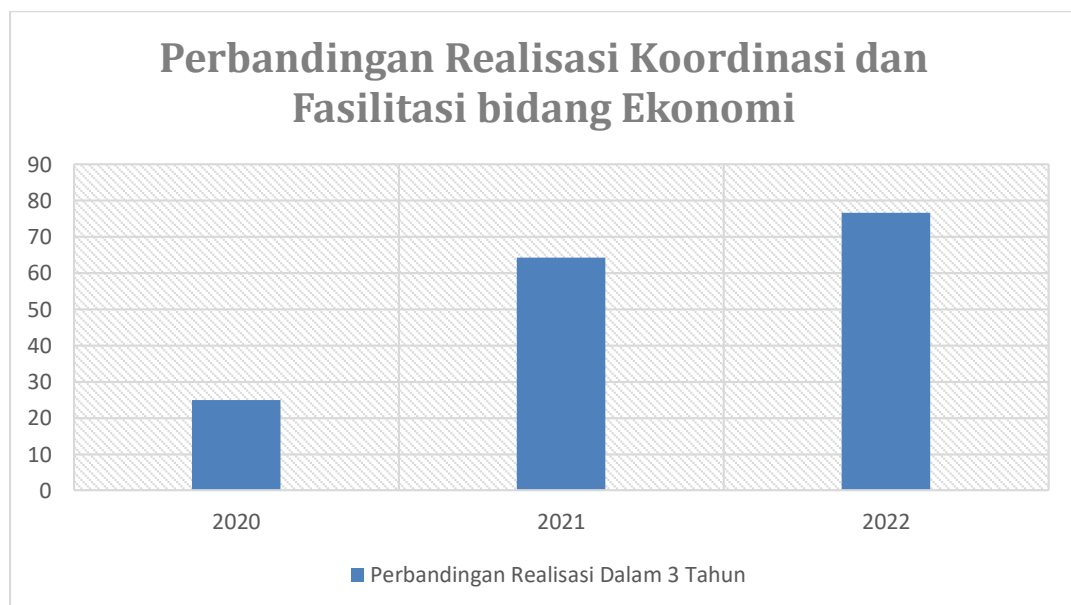
Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sarasannya adalah Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Ekonomi dan Ivestasi. Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Ekonomi dan Ivestasi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

#### Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Ekonomi dan Investasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2022			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Presentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	25%	64,3%	85%	76,7%	90,23%	Sangat Berhasil

Hasil Koordinasi yang dan Fasilitasi bidang Ekonomi dan Investasi tahun 2022 adalah 76,7 persen dengan capaian 90,23 persen, Koorsinasi dilakukan dibidang Investasi dan sudah berjalan oleh Dinas Terkait antara lain Dinas Pertanian Dan Perkebunan dalam hal pembinaan Masyarakat lokal. Selanjutnya dilakukan koordinasi terkait belum adanya Bahan Regulasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Perbankan, akhirnya sampai hari ini belum Terealisasi. Bagian Perekonomian Setda kemudian melakukan Monitoring Dan Evaluasi Dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan serta evalusai dibidang pariwisata, kopraasi dan UKM. Kendala yang mengakibatkan menghambatnya tercapain target adalah kurangnya koordinasi antara BUMD, BUMN dengan Pemerintah Daerah dalam hal perbankan, di tingkat pembinaan dari dinas pertanian sudah berjalan namun kendala dengan Pemasaran dengan hasil produk lokal serta kurangnya keterbukaan dibidang Pariwisata, kondisi ini berdampak kepada masyarakat luas sehingga belum mendapatkan informasi lokasi Pariwisata.



### Indikator Kinerja

#### Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat

Persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana, untuk

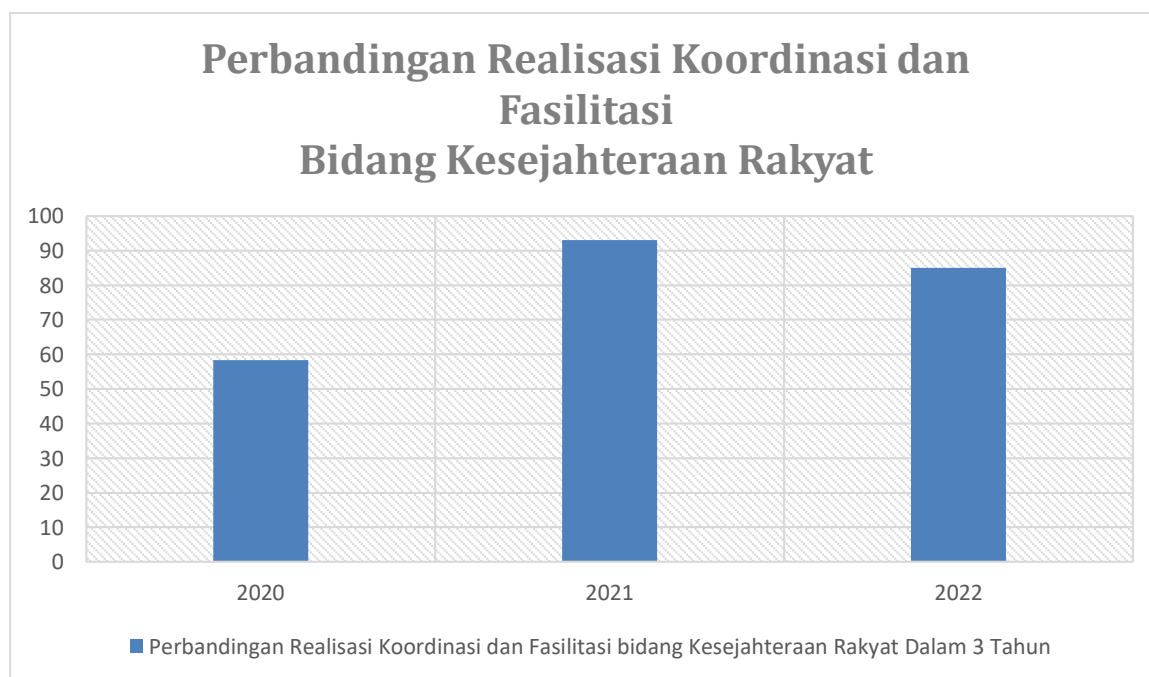
mengukur sasaran ini indikator kinerja sasarannya adalah meningkatnya kualitas koordinasi

dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Presentase Koorinasi yang dilaksanakan sesuai rencana	58,3%	93%	85%	95%	111,76%	Sangat Berhasil

Realisasi persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana dibidang fasilitasi pengelolaan bina mental spritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial ditargetkan dapat terealisasikan sebanyak 93 persen dengan capaian 116,25 persen melebihi target yang ditetapkan yaitu 85% di tahun 2022.



Capaian ini disebabkan instansi terkait aktif dalam menerima, mencari dan menyampaikan serta cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang mencakup fasilitasi pengelolaan bina mental spritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat, meliputi bantuan kepada LMA Kabupaten, LMA distrik sebanyak 40 distrik, dewan adat, dharmawanita, organisasi FKUB, PHBI, PHBK, PGGJ, Panitia Pesparawi, 49 Gereja, Bantua Duka, Yayasan Peduli Tailarek dan 317 bantuan studi akhir dalam negeri (26 Mahasiswa EKSAT dan 287 Mahasiswa jurusan lain) serta luar negeri sebanyak 4 mahasiswa.

### Indikator Kinerja

#### Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Sumber Daya Alam

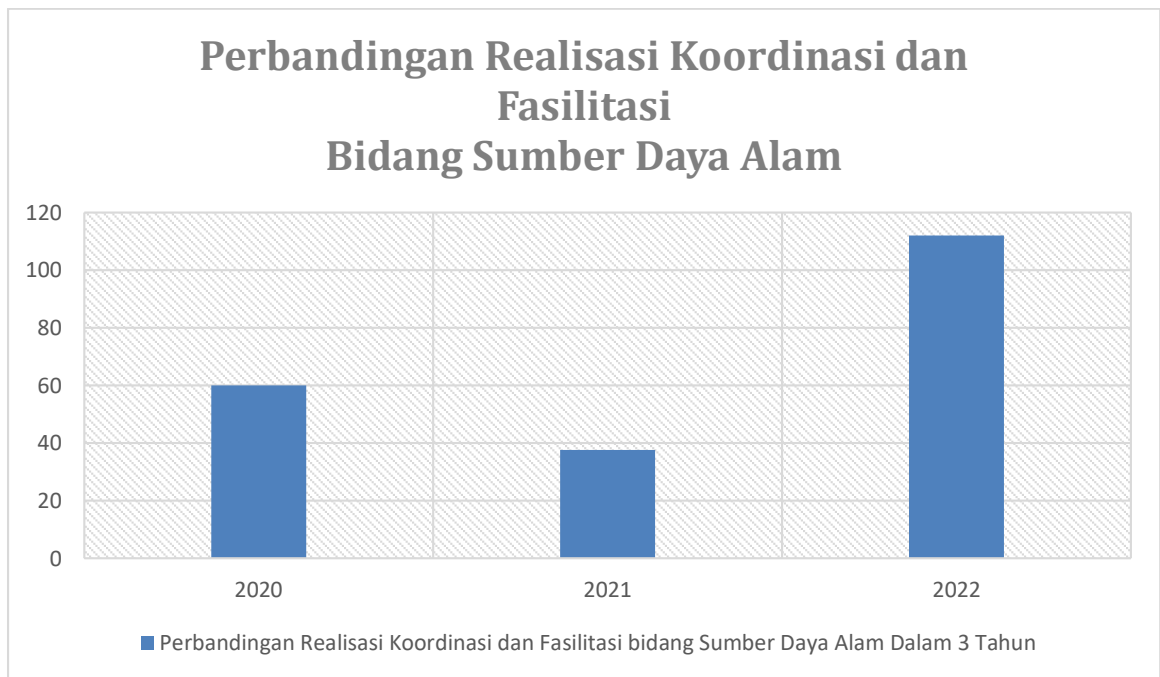
Persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sarannya adalah meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang sumber daya alam. Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang sumber daya alam tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Sumber Daya Alam**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2022			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Presentase Koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	60%	37,6%	85%	112%	131,76%	Sangat Berhasil

Hasil koordinasi dan fasilitasi bidang ekonomi dan investasi tahun 2022 adalah 112 persen dengan capaian 131,76 persen. Capaian tahun 2022 jauh melebihi targer bahkan kinerja di tahun sebelumnya 2021, dimana pada tahun-tahun sebelumnya koordinasi terkendala oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang membatasi pelaksanaan kegiatan tatap muka

seperti koordinasi dan fasilitasi. Pada tahun 2022 bagian Perekonomian Setda secara aktif melakukan monitoring ke distrik-distrik di wamena terkait ketersediaan koperasi dan usaha micro kecil yang sudah berjalan. Koordinasi aktif dilaksanakan setiap triwulan dan paling banyak dilakukan pada triwulan ketiga tahun 2022.



**Indikator Kinerja  
Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**

Persentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sarannya adalah terwujudnya sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Presentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Untuk sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah melakukan memorandum of understanding dengan Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Papua Nomor : 180/04/BUP dan Nomor : W.30 HH.05.05-01, Tanggal 7 Januari Tahun 2020 dan Pembentukan Tim Legislasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dengan Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 09 Januari 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honor Panitia Pelaksana kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020, maka Sinkronisasi 3 Rancangan Produk Hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 696 Tahun 2019 Tentang Penetapan Propemda Tahun 2020 Kabupaten Jayawijaya telah di kaji dan diharmonisasi oleh Tim Ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Papua dan Tim Legislasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, dengan demikian Produk Hukum Daerah Kabupaten Jayawijaya telah Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan.



Untuk tahun anggaran 2022 dengan adanya bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease-2019 dan adanya relokasi dan reccofusing dana kegiatan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebesar 42 persen maka 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 696 Tahun 2019, hanya 2 (dua) Ranperda yang telah dibahas Tim legislasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan Surat Pengantar Nomor 20343 tanggal 24 September 2020 yaitu Ranperda Ketahanan Pangan dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Perihal Pengiriman 2 Ranperda dan 1 (satu) Ranperda tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah belum dibahas Karena Bagian Organisasi belum mengajukan Draft Ranperda.

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah untuk target profuk hukum sebanyak 936 dan realisasi 936 produk atau 100 persen dari target yang ditetapkan. Peraturan Daerah (PERDA) target 9 realisasi 9 atau 100 persen , Peraturan Bupati (PERBUB) target 36 realisasi 36 atau 100 persen dan Surat Keputusan (SK) 885 realisasi 870 atau 98,3 persen.



**Indikator Kinerja  
(Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitas  
bidang Perumahan dan Infrastruktur)**

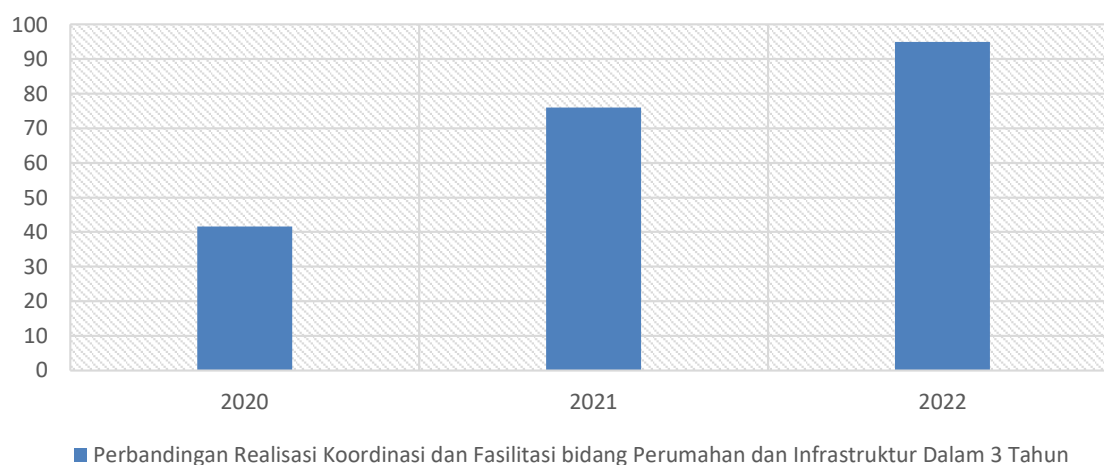
Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang perumahan dan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai rencana, dalam mencapai sasaran ini indikator kinerja sarasannya yang digunakan adalah meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang perumahan dan infrastruktur. Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang perumahan dan infrastruktur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9  
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitas bidang Perumahan dan  
Infrastruktur**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Presentase Koordinasi dan Fasilitas Bidang Perumahan dan Infrastruktur yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	41,6%	76%	85%	95%	111,76%	Sangat Berhasil

Realisasi persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana dibidang perumahan dan Infrastruktur adalah 95% persen melebihi target yang ditetapkan tahun 2022 yaitu 85% dengan capaian 111,76 persen. Capaian ini disebabkan karena OPD terkait aktif menyampaikan laporan dan penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya ralisasi bisa melebihi tahun-tahuun sebelumnya karena proses koordinasi dapat dilaksanakan dengan lebih leluasa pasca pandemi Covid-19. Koordinasi dan fasilitasi bidang perumahan dan infrastruktur antara lain rehabilitasi rumah dinas Pj Gubernur Papua Pegunungan, rehabinitasi asrama mahasiswa/i asal Wamena yang tersebar dibeberapa daerah, Pembangunan Kantor Bupati pasca kerusuhan tanggal 23 september 2019.

## Perbandingan Realisasi Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perumahan dan Infrastruktur



### Indikator Kinerja

#### (Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk mendapatkan persentase indikator kinerja sarannya adalah Meningkatkan Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Peningkatan Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan ketatalaksanaan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2022			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	66,99%	100,52%	85%	100,52%	118,25%	Sangat Berhasil

Untuk menjawab indikator kinerja sasaran diatas dapat kita lihat dari beberapa sub indikator yaitu nilai Surver Kepuasan Masyarakat, Persentase SOP yang sudah disusun oleh

perangkat daerah, kematangan organisasi dan hasil evaluasi jabatan. Nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022 yaitu 77,05 adapun permasalahan yang mempengaruhi nilai SKM adalah kurangnya perhatian kepala perangkat daerah terhadap pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat, ini dapat terlihat dari kuisisioner OPD yang dikembalikan pada bagian Organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah tidak memahami Permenpan 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat yang seharusnya disusun secara mandiri oleh Perangkat daerah. Strategi yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pendampingan penyusunan SKM kepada perangkat daerah dengan harapan perangkat daerah dapat menyusun laporan SKM secara mandiri.

Sub Indikator persentase SOP yang disusun oleh perangkat daerah sebesar 59,69 persen, nilai ini diperoleh dari target yang telah ditetapkan yaitu 696 SOP bagi semua OPD. Sampai tahun 2021 SOP yang telah disusun oleh perangkat daerah adalah 435 SOP atau 59,69 persen sedangkan 278 SOP yang belum terkumpul. Permasalahan yang dihadapi adalah perangkat daerah belum memahami proses penyusunan SOP sehingga masih banyak SOP yang belum terkumpul. Pada tahun 2019 kami telah melakukan beberapa kali Bimtek penyusunan SOP namun nampaknya belum begitu optimal, maka dari itu strategi kami pada tahun ini adalah melakukan pendampingan penyusunan SOP sama halnya seperti SKM.

Sub indikator evaluasi kelembagaan, Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah didapatkan hasil kematangan Organisasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya rendah dengan nilai 27,46 atau 49,93 persen. Hasil evaluasi kelembagaan tersebut merupakan hasil pada tahun 2020, Tahun 2021 dan 2022 tidak dilakukan evaluasi kelembagaan karena Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sedang melakukan penyederhanaan birokrasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, serta permasalahan pandemi covid-19, kehadiran pegawai di kantor belum dapat dilakukan 100%,

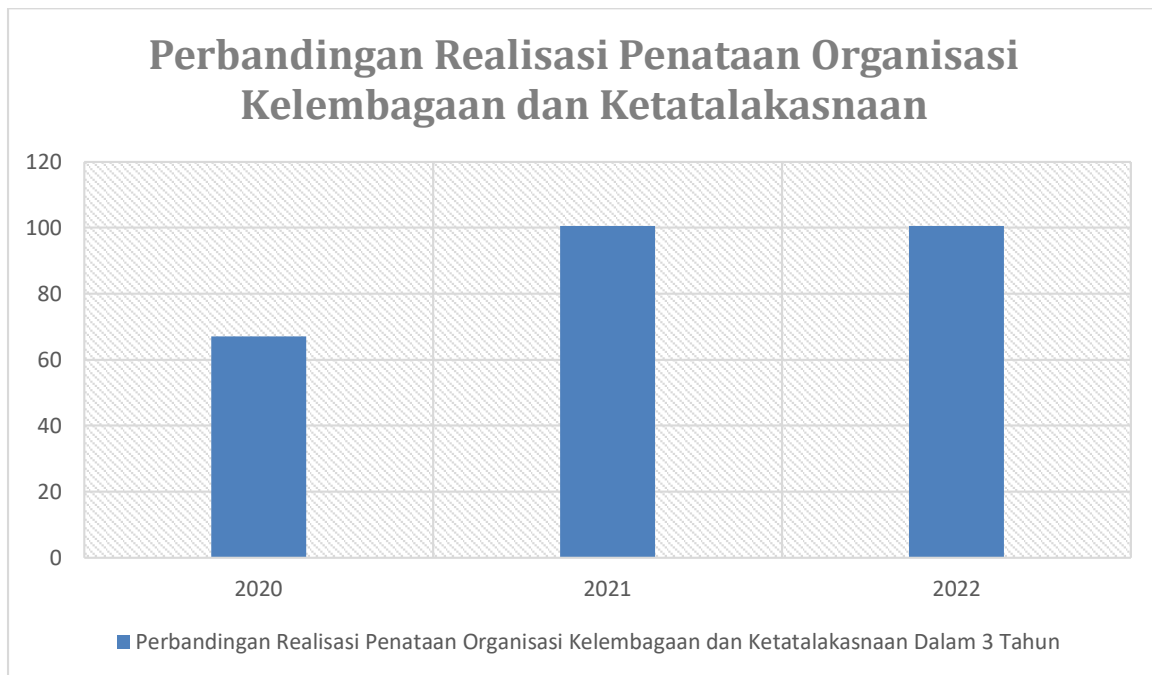
ada peraturan pemberlakuan waktu kerja . kondisi tersebut menjadi pertimbangan tidak dilakukannya evaluasi kelembagaan.

Sub indikator evaluasi jabatan adalah 2713 jabatan sedangkan dalam pelaksanaannya jumlah jabatan yang dievaluasi untuk mendapatkan nilai dan kelas jabatan sejumlah 6041 atau 222,66 persen dari target. Jumlah atau presentasi capaian ini merupakan jumlah dari jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. 6041 adalah jumlah kebutuhan pegawai di kabupaten jayawijaya setelah dilakukan evaluasi jabatan ke seluruh OPD dan disesuaikan dengan usulan kebutuhan OPD. Jumlah kebutuhan pegawai ini merupakan jumlah dari ketersediaan pegawai (*bezetting*) saat ini dan jumlah jabatan yang belum terisi sehingga persentasi untuk ketersediaan pegawai hingga desember 2022 adalah  $3110/6041 \times 100 \% = 51,48$  persen dan jabatan yang belum terisi adalah  $2713/5641 \times 100 \% = 48,09$  persen.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Uraian Kinerja Tahun 2022		
		Bezetting	Kebutuhan	Capaian
1.	Evaluasi Jabatan	2713	6041	44,91 %

Pencapaian ini didukung oleh kerja sama dari setiap Perangkat Daerah selama proses yang dilakukan oleh Tim, khususnya dalam pemenuhan data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi jabatan. Berdasarkan capaian sub indikator untuk mencapai indikator persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran, realisasi kinerja tahun 2021 adalah 100,52 persen dengan capaian hingga 125,65 persen. Nilai tersebut sebenarnya tidak mencapai 100 persen namun pada sub indikator evaluasi jabatan mendapatkan persentase 214,49 persen karena target awal jumlah kebutuhan pegawai dari evaluasi jabatan hanya 2630 namun pada kenyataan dilapangan setelah dilakukan evaluasi jabatan jumlah kebutuhan pegawai adalah 5641 jabatan sehingga persentasenya lebih dari 100 persen. Hal ini perlu dikaji kembali oleh Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi

jabatan untuk dukungan sumber daya manusia dan hasil evaluasi kelembagaan sehingga Perangkat Daerah bisa tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai kebutuhan daerah.



**Indikator Kinerja**  
**Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja**

Predikat SAKIP Kabupaten Jaywijaya, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sarannya adalah Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja. Peningkatan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2022			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Predikat SAKIP	42,87	51,86 (C)	80 (B)	51,86 (C)	64,82%	Cukup Berhasil

Evaluasi dilakukan terhadap implementasi SAKIP yang meliputi Perencanaan kinerja baik perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, hingga pelaporan kinerja serta evaluasi atas perjanjian kinerja.

Mempertimbangkan bahwa nilai LAKIP merupakan hasil evaluasi terhadap SAKIP tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Kemenpan RB melalui perpanjangan tangan Inspektorat Kabupaten setempat yang mana penilaian Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2022 yang baru akan diumumkan pada Triwulan I-II tahun 2023, sehingga hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Jayawijaya menggunakan data Tahun 2021 sebagai perbandingan Target dan Realisasi Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022 yang mana di uraikan sebagai berikut:.

#### 1) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun 2022

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022 disajikan dalam table berikut:

**Tabel 3 Capaian Kinerja SAKIP tahun 2022**

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai SAKIP	75 (B)	51,86 (CC)	69,14%	Cukup Berhasil

Indikator Kinerja “Capaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh KEMENPANRB dan RI” dari sasaran “**Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggara pemerintah daerah**” dengan Target B dan Realisasi C dengan **Nilai 51,86** belum memenuhi target sebesar 75 atau katagori B sebagaimana direncanakan pada RPJMD. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 **sebesar 69,14** persen dengan capaian **cukup berhasil**. Untuk dapat memenuhi target predikat B perlu adanya dorongan nilai akuntabilitas kinerja dari Perangkat

Daerah dimana dari 29 perangkat daerah hanya 1 (satu) perangkat daerah yang memperoleh “A” , 13 (tiga belas) perangkat daerah menerima “BB/B” dan 15 menerima “CC/C” yang berarti 52% perangkat daerah berada pada “CC/C” 45% berada pada “BB/B” dan 3% pada katagori “A” selain itu ada 2 (dua) perangkat daerah mengalami penurunan nilai akuntabilitas di tahun 2021 yakni Dinas Kesehatan sebesar 5% yaitu 59,55 di tahun 2020 menjadi 56,36 pada 2021 dan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) sebesar 3% yaitu 51,75 di tahun 2020 menjadi 50,16 di tahun 2022, disisi lain pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar. Sehingga perlunya komitmen bersama untuk peningkatan nilai SAKIP di tahun depan.

Berdasarkan pencapaian realisasi target kinerja pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dimana rata-rata peningkatan sebesar 4,495 ini menandakan adanya Upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan, namun ketika dibandingkan dengan target capaian perencanaan jangka menengah kabupaten jayawijaya sebesar 64,825% sehingga pada tahun 2023 perlu dilakukan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 35,175% dari tahun 2022 agar mencapai target capaian perencanaan jangka menengah kabupaten jayawijaya

## **2) Efisiensi penggunaan sumber daya Manusia**

Dalam pencapaian kinerja bagian organisasi sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya ditunjang oleh sumber daya yang kurang memadai yang meliputi sumber daya aparatur, anggaran dan peralatan dan lain–lain yang dapat menunjang tercapainya kinerja.

Sumber Daya Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tahun 2022 berjumlah 9 (sembilan) orang pegawai dengan berbagai disiplin ilmu dan kompetensi yang tersebar pada jabatan struktural sebanyak 4 (empat) pegawai, dan jabatan pelaksana sebanyak 5 (lima)



pegawai. Dengan cakupan bidang pembinaan pada 30 perangkat daerah di wilayah Kabupaten Jayawijaya, disisi lain ditunjang juga dengan kasubbag Perencanaan dan program disetiap Perangkat Daerah namun dari 29 kasubbag Perencanaan dan program hanya terisi 23 dan 6 jabatan yang kosong.

Kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, namun hal tersebut dapat di evaluasi sehingga ada peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

**Tabel 3.7**

No.	Jabatan	Formasi	Tersedia	Kebutuhan	%
1.	Struktural	4	4	-	100%
2.	Pelaksana	14	5	9	36%
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>50%</b>

Sumber data Dokumen Evaluasi Jabatan 2022

Jika dilihat dari tabel di atas menggambarkan bahwa informasi jabatan yang terisi sebesar 50% (9 jabatan) dari formasi jabatan yang tersedia, dimana pemangku jabatan struktural eselon III dan eselon IV masing-masing telah terisi, Sedangkan ketersediaan aparatur pelaksana hanya sebesar 36% (5 jabatan) dari 14 formasi jabatan, 5 formasi jabatan yang terisi terdiri dari 2 (dua) Pelaksana sarjana, 1 (satu) D3 dan 2 (dua) SMA .

**Tabel 3.8**

No.	OPD	KASUBBAG. PROGRAM & KEUANGAN
1	SETWAN	1
2	INSPEKTORAT	1
3	PENDIDIKAN	1
4	DINKES	1
5	PUSKESMAS	1
6	DPUPR	1
7	PERUMAHAN	1
8	SATPOL PP	1

9	SOSIAL	0
10	NAKERINDAG	0
11	DP3KB	1
12	KETAHANAN PANGAN	1
13	LINGKUNGAN HIDUP	0
14	DUCKCAPIL	1
15	DPMK	1
16	PERHUBUNGAN	1
17	KOMINFO	1
18	PTSP	0
19	DISORDA	1
20	KEBUDAYAAN	1
21	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0
22	PERIKANAN	0
23	PERTANIAN	1
24	BAPPEDA	1
25	BPKAD	1
26	BKDPSDM	1
27	BPBD	1
28	KASBANGPOL	1
29	RSUD	1
	<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

Sumber data Dokumen Evaluasi Jabatan 2022

Tabel diatas menggambarkan jumlah sumber daya manusia di perangkat daerah yakni 23 jabatan yang terisi dan 6 jabatan yang belum terisi hal ini mempengaruhi proses analisis dan pengumpulan dokumen SAKIP yang mana dari tahun ketahun mengalami permasalahan, sehingga kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas, guna menunjangnya pelaksanaan kegiatan.

Untuk melakukan Penyusunan LkjIP pada tahun 2022 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja operasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah **Rp. 250.000.000**, Sedangkan realisasi belanja pada Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 247.892.868** sehingga capaian realisasi sebesar **99,157%** yang dikelola oleh Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu hasil nilai evaluasi SAKIP di Perangkat Daerah naik seiring dengan perbaikan dokumen pendukung SAKIP. Ada beberapa perangkat daerah yang tidak mengumpulkan dokumen SAKIP ke Inspektorat, nilai SAKIP tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

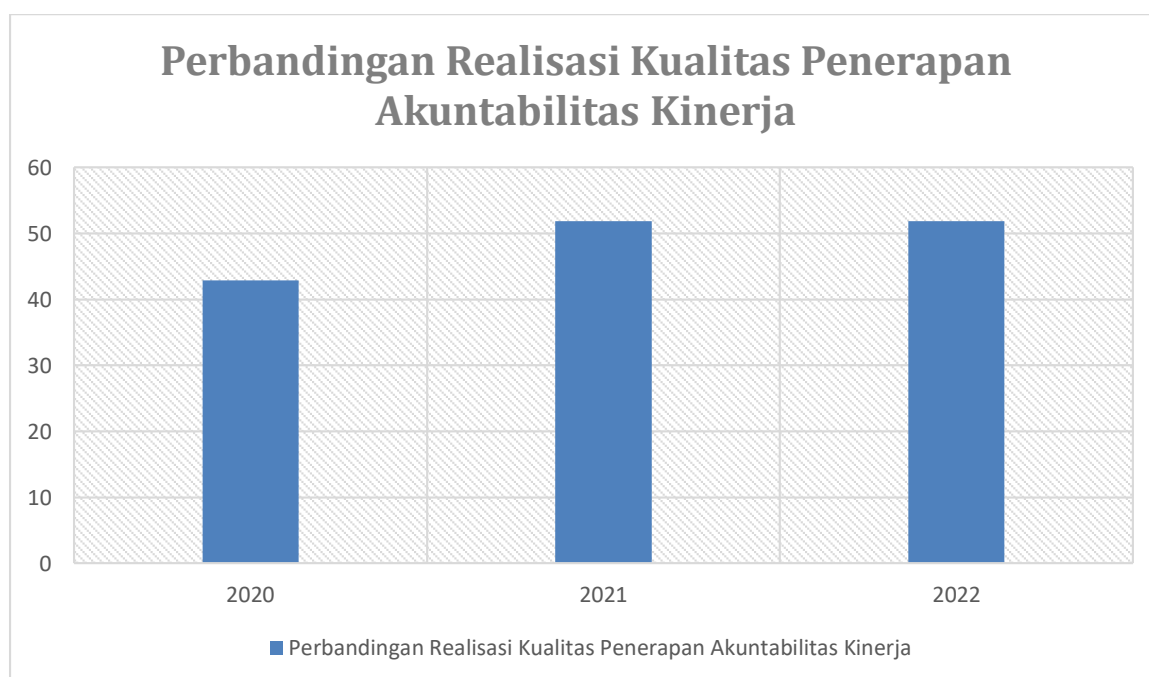
NO	NAMA	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	69,22	B	71,74	BB	80,17	A
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72,26	BB	73,14	BB	73,25	BB
3	Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69,41	B	71,91	BB	71,95	BB
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41,2	C	60,73	B	70,86	BB
5	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	67,91	B	69,79	B	69,93	B
6	Sekretariat DPRD	61,59	B	66,44	B	68,37	B
7	Sekretaris Daerah	50,27	CC	51,24	CC	63,71	B
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	62,27	B	62,93	B	63,15	B
9	Inspektorat Daerah	61,71	B	62,58	B	62,97	B
10	Dinas Olahraga dan Pemuda	50,18	CC	55	CC	61,29	B
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50,18	CC	53,68	CC	61,13	B
12	Dinas Perhubungan	30,56	C	60,51	B	60,57	B
13	Satuan Polisi Pamong Praja	38,53	C	37,78	C	60,45	B
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	59,26	CC	59,51	CC	60,16	B
15	Dinas Kesehatan	26,05	D	59,55	CC	56,36	CC
16	Dinas Perikanan	51,87	CC	53,28	CC	53,66	CC
17	Dinas Sosial	20,21	D	45,14	C	53,37	CC
18	Dinas Pendidikan	46,38	C	51,94	CC	53,31	CC
19	Dinas Pertanian	50,11	CC	52,67	CC	53,06	CC
20	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52,32	CC	51,57	CC	50,16	CC

21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	34,79	C	34,04	C	50,13	CC
22	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	30,97	C	30,17	C	49,09	C
23	Dinas Lingkungan Hidup	42,17	C	41,42	C	47,91	C
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	33,92	C	33,17	C	47,29	C
25	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	33,43	C	41,72	C	42,2	C
26	Dinas Ketahanan Pangan	35,49	C	33,86	C	36,89	C
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33,98	C	33,18	C	35,76	C
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	25,29	D	24,54	D	35,11	C
29	RSUD *)	20,21	D				
	NILAI RATA-RATA	45,58	C	51,54	CC	56,87	CC

**Tabel 3.12**

### Perkembangan Nilai Sakip Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya

Sumber : Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, Tahun 2022



Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan capaian kinerja di tahun 2020 dan 2021 yaitu meningkat 0,45 point dan kemudian capaian kinerja turun di tahun 2022 menjadi 2,76 point, namun jika dilihat realisasi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,495 meskipun

peningkatan tersebut relatif kecil namun kondisi ini menggambarkan Pemerintah Daerah telah berupaya untuk melakukan perbaikan dari setiap komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

**Indikator Kinerja**  
**Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja**

Nilai LPPD, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja. Peningkatan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2022			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai LPPD	2.9251	2.7214	3	2.7214	90,713%	Sangat Berhasil

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wadah sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan, Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Akan tetapi hingga saat ini belum ada hasil evaluasi LPPD tahun 2022 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga hasil evaluasi LPPD menggunakan hasil Tahun 2021.

Hasil validasi terhadap Evaluasi LPPD oleh Tim Evaluasi gabungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memberikan skor terhadap Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebesar 2,7214 dengan Prestasi Tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IKK yang berdampak pada menurunnya nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yaitu Penyampaian data pendukung IKK LPPD dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak tepat waktu, Penyajian data pendukung dari Organisasi Perangkat daerah yang menangani urusan belum terpilah secara baik dan rapi sehingga ada data pendukung yang tidak terisi, dan Kesalahan persepsi dalam menentukan data pendukung yang dibutuhkan, oleh sebab itu Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung IKK LPPD kepada Perangkat Daerah, Mengadakan koordinasi dan konsultasi yang baik antara Tim penyusun dan Perangkat Daerah penyedia data dalam rangka pemahaman data pendukung yang dibutuhkan, sehingga diharapkan hasil penilaian LPPD mendatang akan mencapai target yang telah ditetapkan oleh daerah.



## Indikator Kinerja

### Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Peresentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

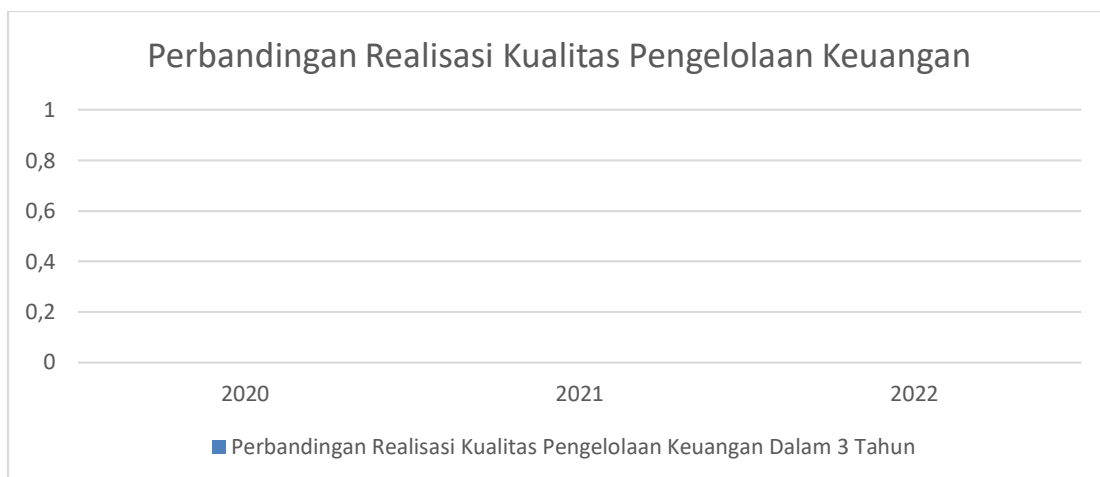
**Tabel 3.15**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Kinerja 2021	Uraian Kinerja Tahun 2022			Kriteria
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase anggaran yang menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	Sangat Berhasil

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan dari BPK untuk pengelolaan pengeluaran daerah tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya antara target dan realisasi adalah 0 persen ini berarti bahwa secara tidak langsung capaian efektivitas pengelolaan pengeluaran pada sekretariat daerah mencapai 100 persen.

Adapun hasil temuan yang di temukan dan menjadi catatan BPK untuk sekretariat daerah tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 merupakan perbaikan administrasi berdasarkan tupoksi bagi staf dan pejabat penatausahaan pengelolaan dan semua aparatur yang terlibat dalam proses keuangan daerah

Selain hasil temuan BPK lebih diarahkan pada pemahaman SDM Aparatur akan tahapan-tahapan dan proses keuangan / mekanisme yang benar berdasarkan peraturan penatausahaan keuangan yang benar.



### Capaian Kinerja Bagian-Bagian Sekretariat Daerah

**Tabel 3.16**  
**Hasil Capaian Kinerja Bagian Pada Sekretariat Daerah**

<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/Bulan	125 Orang/Bulan	100%
Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	2110 Dokumen	211%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33 Paket	33 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 Paket	2 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	7 Paket	7 Paket	104%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	2 Dokumen	40%
Penyediaan Bahan / Material	4 Paket	4 Paket	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	25 Laporan	100%
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	100%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	200 buah	200 buah	100%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	2 Unit	50%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	2 unit	2 unit	100%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	100%

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Laporan	7 Laporan	100%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	3 jenis	3 jenis	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45 Unit	45 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100%
Penyediaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1 Orang	50%
<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3 Paket	3 Paket	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3 Paket	3 Paket	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3 Paket	3 Paket	100%
<b>Penataan Organisasi</b>			
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2 laporan	100 %
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	2 dokumen	2 Dokumen	100%

Daerah			
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>			
Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	3 Laporan	100%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	100%
<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>			
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>			
Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat</b>			
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 dokumen	100%
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	2 Kasus	2 Kasus	100%
Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	2 Kasus	100%
Pendokumentasian Produk dan Pengelolaan Informasi Hukum	936 dokumen	936 dokumen	100%
<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>			
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>			
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>			
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	100%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	1 dokumen	100%

<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>			
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	350 Dokumen	207 Dokumen	60%
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Laporan	3 Laporan	100%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	21 Orang	21 Orang	100%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian kinerja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah adalah **98.5 persen** dengan demikian dapat dikatakan program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah masuk dalam kategori Sangat Berhasil, diharapkan pada tahun - tahun berikutnya Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya dapat mempertahankan hasil tersebut.

**Tabel 3.17**  
**Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022**

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	101,176%	Sangat Berhasil
	Peningkatannilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	90,64%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Citra Positif Kabupaten Jayawijaya	102,04%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ekonomi dan Investasi	90,23%	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	111,76%	Sangat Berhasil

5.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sumber Daya Alam	131,76%	Sangat Berhasil
6.	Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perumahan dan Infrastruktur	111,76%	Sangat Berhasil
8.	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	118,25%	Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja ( Predikat SAKIP)	64,82%	Cukup Berhasil
	Nilai LPPD	90,713%	Sangat Berhasil
10.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	100%	Sangat Berhasil
<b>Capaian Rata-Rata</b>			<b>102,56%</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja pada keseluruhan indikator kinerja sasaran yang diperoleh Sekretariat Daerah adalah sebesar **102,56 persen** sehingga dapat dikategorikan capaian kinerja Sekretariat Daerah adalah **Sangat Berhasil**.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2022 dapat diuraikan dalam kelompok belanja operasi yang merupakan belanja Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dimana dana

tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam usaha mencapai target indikator kinerja sasaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Sekretariat Daerah bahwa tahun anggaran 2022 Sekretariat Daerah menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 162.882.385.697,- dan belanja modal sebesar Rp. 107.866.592.070,- dengan rincian realisasi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18**  
**Realisasi Anggaran T.A 2022**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Th 2022 (Sebelum Perubahan)	Anggaran Th 2022 (Setelah Perubahan)	Realisasi Th 2022	Realisasi
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>206.701.539.202</b>	<b>238.475.470.972</b>	<b>195.320.926.927</b>	<b>81.9</b>
<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>533.499.900</b>	<b>613.499.900</b>	<b>593.094.000</b>	<b>96.6</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	70.000.000	69.950.000	99.9
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.999.900	19.999.900	19.965.000	99.8
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000	150.000.000	149.885.000	99.8
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	149.819.000	99.9
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.320.469.546</b>	<b>15.165.292.092</b>	<b>13.816.294.728</b>	<b>91.1</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.435.219.546	14.110.042.092	12.766.220.728	90.4
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	530.000.000	580.000.000	575.224.000	99.1

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	180.000.000	200.000.000	199.810.000	99.9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	175.250.000	275.250.000	275.040.000	99.9
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15.859.775.000</b>	<b>28.384.366.500</b>	<b>28.261.068.750</b>	<b>99.5</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	210.904.000	210.904.000	210.333.000	99.7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.912.000	295.912.000	295.912.000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.171.235.000	4.201.438.000	4.170.220.000	99.2
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.735.000.000	3.076.196.500	3.074.847.500	99.9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	52.080.000	52.080.000	16.080.000	91.9
Penyediaan Bahan/Material	1.450.594.000	1.450.594.000	1.450.313.000	99.9
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.999.993.000	10.827.563.000	10.827.472.000	99.9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.944.057.000	8.944.057.000	8.215.171.250	63
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100.350.400.000</b>	<b>102.231.275.000</b>	<b>64.431.440.100</b>	<b>30.9</b>
Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	295.912.000	295.912.000	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.350.400.000	4.201.438.000	4.170.220.000	99.2
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>11.132.724.000</b>	<b>3.076.196.500</b>	<b>3.074.847.500</b>	<b>99.9</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.073.634.800	52.080.000	52.080.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.637.489.200	1.450.594.000	1.450.313.000	99.9

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000.000	10.827.563.000	10.827.472.000	99.9
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.721.600.000	28.384.366.500	28.261.068.750	99.5
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.068.969.000</b>	<b>210.904.000</b>	<b>210.333.000</b>	<b>99.7</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.857.765.000	295.912.000	295.912.000	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	961.350.000	4.201.438.000	4.170.220.000	99.2
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.854.000	3.076.196.500	3.074.847.500	99.9
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>679.316.240</b>	<b>52.080.000</b>	<b>52.080.000</b>	<b>100</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	480.425.240	1.450.594.000	1.450.313.000	99.9
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	198.936.000	10.827.563.000	10.827.472.000	99.9
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	28.384.366.500	28.261.068.750	99.5
<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>799.413.000</b>	<b>1.049.402.000</b>	<b>1.048.937.000</b>	<b>99.9</b>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	350.000.000	350.000.000	349.875.000	99.9
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	299.780.000	99.9
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	149.413.000	399.402.000	399.282.000	99.9
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.260.433.000</b>	<b>1.201.096.000</b>	<b>99.2</b>



Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	505.000.000	565.433.000	520.616.089	92
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	245.000.000	245.000.000	244.350.447	99.7
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200.000.000	200.000.000	188.796.697	94.3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	250.000.000	250.000.000	247.332.868	98.9
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>58.756.927.516</b>	<b>67.644.880.516</b>	<b>66.370.424.448</b>	<b>98.1</b>
Fasilitasi Keprotokolan	600.000.000	600.000.000	583.962.439	97.3
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	56.676.742.000	65.564.695.000	64.306.282.219	98
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.480.185.516	1.480.185.516	1.480.179.790	99.9
<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>25.010.173.150</b>	<b>29.366.875.820</b>	<b>28.878.924.738</b>	<b>98.3</b>
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>950.000.000</b>	<b>1.549.030.670</b>	<b>1.444.519.327</b>	<b>93.2</b>
Penataan Administrasi Pemerintahan	300.000.000	300.000.000	219.764.255	73.2
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	250.000.000	250.000.000	157.848.502	63.1
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	400.000.000	999.030.670	994.906.570	99.5
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>21.460.573.150</b>	<b>25.018.245.150</b>	<b>24.776.845.150</b>	<b>99</b>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.048.580.300	13.885.293.460	13.883.093.460	99.9
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	10.886.713.160	2.050.000.000	1.835.000.000	89.5
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.525.279.690	9.082.951.690	9.058.750.690	99.7
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>2.599.600.000</b>	<b>2.599.600.000</b>	<b>2.457.560.261</b>	<b>94.5</b>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.200.000.000	1.200.000.000	1.196.982.440	99.7
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.200.000.000	1.200.000.000	1.061.169.582	88.4

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	199.600.000	199.600.000	199.408.239	99.9
<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	-	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100</b>
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	-	200.000.000	200.000.000	100
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>2.670.490.975</b>	<b>2.906.630.975</b>	<b>2.547.663.084</b>	<b>87.6</b>
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>169.487.500</b>	<b>99.6</b>
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	72.500.000	72.500.000	72.300.000	99.7
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	97.500.000	97.500.000	97.187.500	99.6
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>294.963.424</b>	<b>98.3</b>
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	102.500.000	102.500.000	101.598.000	99
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	97.500.000	97.500.000	93.612.140	96
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100.000.000	100.000.000	99.744.284	97.7
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>2.200.490.975</b>	<b>2.436.630.975</b>	<b>2.083.212.160</b>	<b>85.4</b>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.145.490.975	1.450.490.975	1.201.244.404	82.8
Pengelolaan Layanan Pengelolaan secara Elektronik	450.000.000	450.000.000	407.528.226	90.5
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000	536.140.000	474.439.530	88.4

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Setda bahwa tahun 2022, menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp. 133.902.637.327,- dan belanja Modal sebesar Rp. 100.479.566.000,- sehingga Total Pagu anggaran tahun 2022 adalah Rp. 234.382.203.327,-

Tahun Anggaran 2022 di triwulan IV pada perubahan anggaran, Sekretariat Daerah juga melakukan penambahan anggaran karena kebutuhan yang dianggap perlu dilakukan pada tahun 2022, yang mana belanja operasi Rp. 162.882.385.697,- dan belanja modal

menjadi Rp. 107.866.592.070,- maka jumlah pagu anggaran Sekretariat Daerah menjadi Rp. 270.748.977.969,- dengan realisasi sebesar Rp.226.747.514.018,-. atau 83.7 persen .

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA**

Kesimpulan yang diambil bahwa sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah untuk Tahun 2022 sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan bahwa keseluruhan indikator kinerja capaian memenuhi capaian target dengan kategori berhasil. Hal itu bisa di capai karena komitmen para pejabat untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh tugas dengan baik walaupun masih ada beberapa hal yang harus di perbaiki ke depannya.

### **A. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Tantangan dan permasalahan tentunya senantiasa ditemui dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, beberapa hal yang menjadi permasalahan Sekretariat Daerah yaitu perlunya kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kualitas aparatur, hal ini perlu keseriusan dalam tindaklanjut mengingat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai perumus kebijakan pemerintah daerah dan pelayan teknis administratif bagi perangkat daerah lainnya. Permasalahan berikut adalah kegiatan – kegiatan yang sudah ada tetapi tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan belum optimalnya kinerja perangkat daerah.

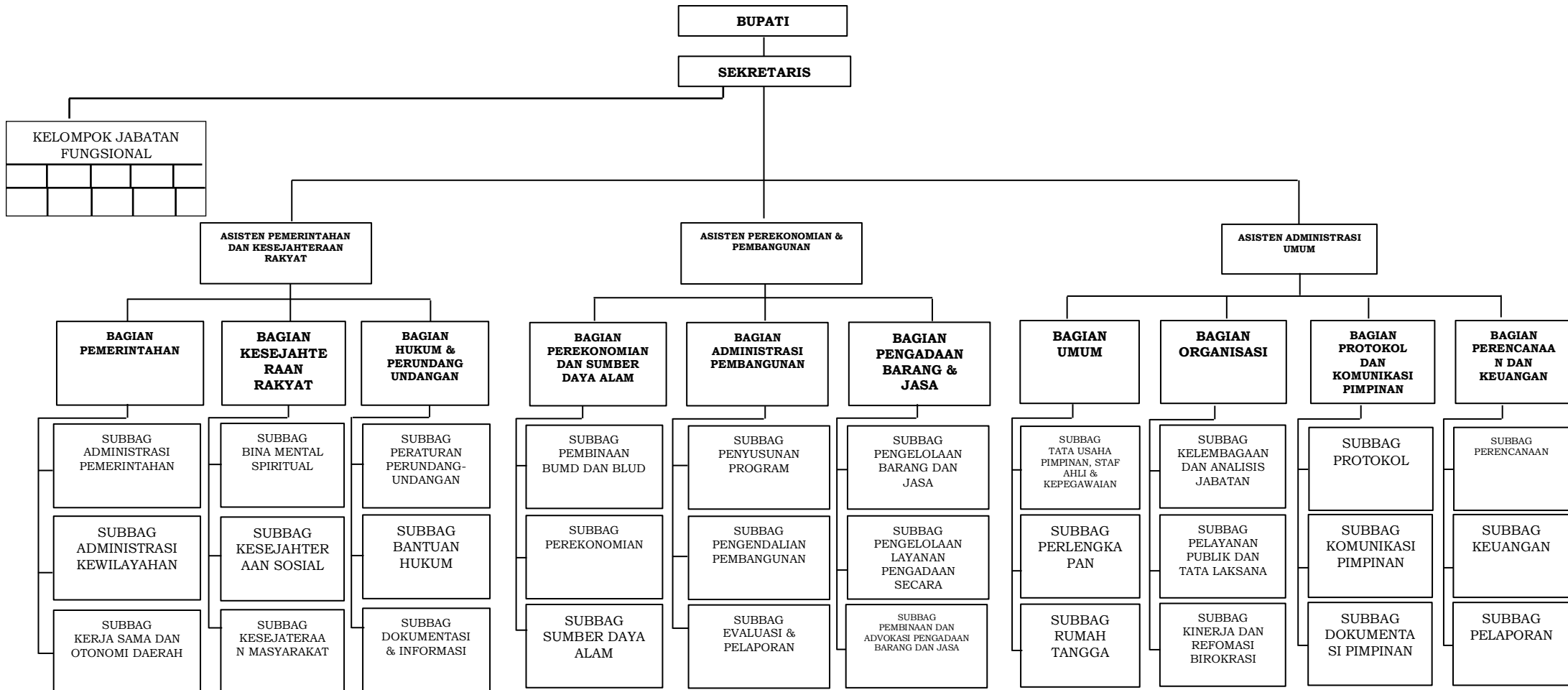
### **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasar pada permasalahan yang ditemui pada Tahun 2022, maka hal-hal yang perlu diprioritaskan untuk rencana berikutnya adalah:

1. Memprioritaskan peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran serta pembangunan budaya kerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil agar dapat meningkatkan Capaian Kinerja di Pemerintah Kabupaten.
2. Meningkatkan fungsi pembinaan aparatur dan kelembagaan terhadap OPD yang dibawah koordinasi Sekretariat Daerah dan pemerintah terendah di Kabupaten.
3. Memprioritaskan fungsi koordinasi dalam penyelesaian masalah dan perumusan kebijakan pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban dan bahan evaluasi kerja ke depan.

WAMENA, Februari 2023





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : **THONY M. MAYOR, S.Pd, MM**

**Jabatan** : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama** : **JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si**

**Jabatan** : **BUPATI JAYAWIJAYA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 16 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



**JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si**



**THONY M. MAYOR, S.Pd, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690807 199702 1 003**

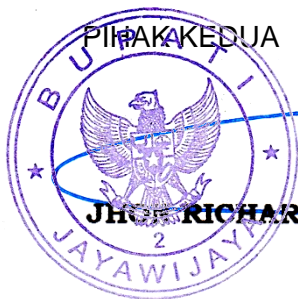
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi	85
		IKM	85
2	Meningkatnya citra positif Kabupaten Jayawijaya	Persentase berita positif kabupaten Jayawijaya pada publik	98
3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang ekonomi dan investasi	Persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	85
4	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	85
5	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	85
6	Terwujudnya sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan	100
7	Meningkatnya kualitas kordinasi dan fasilitasi bidang Perumahan dan Infrastruktur	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang perumahan dan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai rencana	85
8	Meningkatnya kualitas penataan organsasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	85
9	Meningkat kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Kabupaten Jayawijaya	85
		Nilai LPPD	3
10	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya	0,00

No	Program	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp	206.701.539.202
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	25.010.173.150
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.670.490.975

Wamena, 16 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



**JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si**



**THONY M. MAYOR, S.Pd, MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19690807 199702 1 003**